

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pengkadan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2022 dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Renja Kecamatan Pengkadan Tahun 2023 merupakan Dokumen induk rencana pembangunan tahunan Kecamatan Pengkadan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Pengkadan selama 1 (satu) tahun ke depan dengan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026, yang dalam pelaksanaannya setiap tahun akan dijabarkan dan menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pengkadan, Kabupaten Kapuas Hulu.

Disampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan Renja Kecamatan Pengkadan Tahun 2023. Diharapkan Dokumen ini dapat bermanfaat sebagai instrumen pertanggungjawaban dalam melaksanakan mandat yang diemban Kecamatan Pengkadan.

Pengkadan, Februari 2022  
Camat Pengkadan,

**TABRI, S.E., M. A.P**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19641222 198703 1 006

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
Daftar Tabel .....	iii
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1. 1. Latar Belakang .....	3
1. 2. Landasan Hukum .....	4
1. 3. Maksud dan Tujuan .....	6
1.3.1. Maksud .....	6
1.3.2. Tujuan .....	6
1. 4. Sistematika Penulisan Renja OPD .....	7
 <b>BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN SEBELUMNYA</b>	
2. 1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Sebelumnya dan Capaian Renja SKPD .....	8
2. 2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD .....	13
2. 3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD .....	19
2. 4. Review Terhadap RKPD .....	20
2. 5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	25
 <b>BAB III TUJUAN, SASARAN DAN KEGIATAN</b>	
3. 1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi .....	28
3. 2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD .....	28
3. 3. Program dan Kegiatan .....	32
 <b>BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN PENGKADAN</b>	 36
 <b>BAB V PENUTUP</b> .....	 39

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Rencana Kerja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Penyusunan Rencana Kerja, merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Renja untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran SKPD Kecamatan Pengkadan.

Sebagai dokumen rencana tahunan SKPD, Renja Kecamatan Pengkadan mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substantif penerjemahan dari visi, misi dan program SKPD Kecamatan Pengkadan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan SKPD untuk merencanakan program kegiatan disesuaikan dengan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA) dan (PPAS) dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2023.
3. Renja SKPD merupakan salah satu instrument untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Pengkadan sebagai wujud dari kinerja tahun 2022 ini merupakan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra).

Mengingat arti strategis Dokumen Renja SKPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan Dokumen Renja SKPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2021 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah.

## 1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan Hukum Kecamatan Pengkadan dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 27 tahun 1959 tentang tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9 Tambahan Negara Nomor 352);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
11. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Desa;
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali , terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018;

22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2034;
23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Prov. Kalimantan Barat Tahun 2005-2025;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan di Kabupaten Kapuas Hulu;
25. Peraturan Bupati Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 46 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Uraian Tugas Jabatan Pada Pemerintah Kecamatan Kabupaten Kapuas Hulu;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2018-2034;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2031.

### 1.3. Maksud dan Tujuan

#### 1.3.1. Maksud

Maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pengkadan adalah sebagai Dokumen perencanaan dan penganggaran untuk periode satu tahun anggaran dan mempunyai fungsi :

- a. Sebagai penjabaran Rencana Strategis Kecamatan Pengkadan tahun 2023 dalam rencana program prioritas.
- b. Sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan Kecamatan Pengkadan yang memuat arah kebijakan di Kecamatan Pengkadan.

#### 1.3.2. Tujuan

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah untuk memaduserasikan antara Renja dengan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS,) dan untuk :

- a. Mensinkronisasi serta mensinergikan program dan kegiatan Kecamatan Pengkadan Tahun 2023 dengan target dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana terumus dalam dokumen RKPD Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2022 .
- b. Menciptakan kepastian dan sinergitas perencanaan program kegiatan dalam keterpaduan sumber dana, sumber daya, serta sumber daya manusia.

- c. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi sumber daya serta produktifitas dalam peningkatan kinerja Kecamatan Pengkadan
- d. Membuat acuan perencanaan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD Kecamatan Pengkadan.

#### **1.4. Sistematika Penulisan Renja OPD**

Adapun sistematika Penulisan Renja OPD Kecamatan Pengkadan sebagai berikut :

##### **A. BAB I : PENDAHULUAN**

- 1.1. LATAR BELAKANG
- 1.2. LANDASAN HUKUM
- 1.3. MAKSUD DAN TUJUAN
- 1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

##### **B. BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN SEBELUMNYA**

- 2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN SEBELUMNYA  
DANCAPAIAN RENSTRA SKPD
- 2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD
- 2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD
- 2.4. REVIEW TERHADAP RKPD
- 2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

##### **C. BAB III : TUJUAN, SASARAN DAN KEGIATAN**

- 3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI
- 3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD
- 3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

##### **D. BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN PENGKADAN**

##### **E. BAB V : PENUTUP**

##### **LAMPIRAN**

## BAB II

### EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN SEBELUMNYA

#### 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Sebelumnya dan Capaian Renstra SKPD

Evaluasi kinerja didasarkan atas keberhasilan setiap program kegiatan yang telah dilaksanakan. Program dan kegiatan diukur sampai sejauh mana keberhasilan dan realisasinya selama satu tahun. Tahun 2016 SKPD Kecamatan Pengkadan Kabupaten Kapuas Hulu telah memberikan hasil yang signifikan sesuai dengan visi dan misi yang diemban. Hal ini dapat terlihat dari pencapaian dan realisasi yang akan disajikan dalam capaian kinerja tahun 2016. Hal ini akan terlihat dalam Tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Kecamatan Pengkadan Tahun 2021 s/d Tahun 2026.

Untuk Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan, Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah, dan Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil.

Untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut disajikan dalam **Tabel T-C.29**.



**Tabel T-C.29.**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan**  
**Pencapaian Renstra Kecamatan Pengkadan Tahun 2021s/d Tahun 2026**  
**Kabupaten Kapuas Hulu**

**Kantor Kecamatan Pengkadan**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangka t Daerah) Tahun 2016	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Progra m dan kegiata n (Renja Perang kat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisas i (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7.01.01 7.01.01.2.01 7.01.01.2.01.03	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Perencanaan,Pengang garan,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	100%	100%	2,000,000	2,000,000	100%	100%	100%	100%
7.01.01.2.01.04		- Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	100%	100%	2,000,000	2,000,000	100%	100%	100%	100%

7.01.01.2.01.05		- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	100%	100%	2,000,000	2,000,000	100%	100%	100%	100%
7.01.01.2.02 7.01.01.2.01		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	1,810,365,419	1,810,365,419	100%	100%	100%	100%
7.01.01.2.02.03		- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100%	100%	165,960,000	165,960,000	100%	100%	100%	100%
7.01.01.2.05 7.01.01.2.05.02		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	100%	100%	18,000,000	18,000,000	100%	100%	100%	100%
7.01.01.2.06 7.01.01.2.06.01		Administrasi Umum Perangkat Daerah - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100%	100%	3,640,000	3,640,000	100%	100%	100%	100%
7.01.01.2.06.02		- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	100%	53,579,300	53,579,300	100%	100%	100%	100%

7.01.01.2.06.03		- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	100%	100%	14,230,000	14,230,000	100%	100%	100%	100%
7.01.01.2.06.05		- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100%	100%	2,800,000	2,800,000	100%	100%	100%	100%
7.01.01.2.06.09		- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	100%	212,500,000	212,500,000	100%	100%	100%	100%
7.01.01.2.08 7.01.01.2.08.01		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100%	100%	2,010,000	2,010,000	100%	100%	100%	100%
7.01.01.2.08.02		- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	100%	6,000,000	6,000,000	100%	100%	100%	100%
7.01.01.2.08.04		- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	100%	153,600,000	153,600,000	100%	100%	100%	100%

7.01.01.2.09 7.01.01.2.09.01		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100%	100%	400,000	400,000	100%	100%	100%	100%
7.01.01.2.09.06		- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	100%	100%	7,790,000	7,790,000	100%	100%	100%	100%
7.01.06 7.01.06.2.01 7.01.06.2.01.13	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	100%	100%	5,638,000	5,638,000	100%	100%	100%	100%

## 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Bagian ini berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Kecamatan Pengkadan berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK (Indikator Kinerja Kunci) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, atau IKU (Indikator Kinerja Utama) yang ditetapkan Pemerintah Daerah. Kinerja Pelayanan di Kecamatan Pengkadan dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja

- a. Meningkatnya perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
- b. Meningkatnya pengadministrasian keuangan perangkat daerah.
- c. Meningkatnya pengadministrasian kepegawaian perangkat daerah.
- d. Meningkatnya pengadministrasian umum perangkat daerah
- e. Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.
- f. Meningkatnya sinergitas perencanaan daerah.
- g. Meningkatnya percepatan pencapaian IPM.
- h. Meningkatnya kinerja Kecamatan.
- i. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketentraman dan keamanan.
- j. Meningkatnya pemeliharaan barang milik daerah sebagai penunjang urusan pemerintah daerah.
- k. Meningkatnya fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa.
- l. Meningkatkan peran serta kesetaraan gender dalam pembangunan.
- m. Meningkatkan peran serta kepemudaan.

Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Kecamatan Pengkadan yang merupakan tolak ukur dari pencapaian pembangunan di Kecamatan Pengkadan dengan memperhatikan kontribusi dari Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat serta pihak lain, pengukuran kinerja tersebut merupakan implementasi dari target pencapaian Misi Kecamatan Pengkadan sesuai Renstra Tahun 2021-2026 yang bersinergi dengan RKPD Kabupaten Kapuas Hulu yang dimana merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026 sesuai dengan pencapaian Visi, Misi dan target Kabupaten Kapuas Hulu. Realisasi pencapaian program dan kegiatan pada tahun 2016 pada Satuan Kerja Kecamatan Pengkadan memiliki pencapaian kinerja terrealisasi sebesar 100 % dan Belanja Langsung.

Rincian Realisasi Belanja Pelayanan Aparatur dan Belanja Publik dijelaskan pada Tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Pengkadan (Lihat **Tabel T-C.30**)

**Tabel T-C.30.**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Pengkadan**  
**Kabupaten Kapuas Hulu**

No	Indikator	SPM / standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2015 (thn n-2)	Tahun 2016 (thn n-1)	Tahun 2017 (thn n)	Tahun 2021(thn n+1)	Tahun 2015 (thn n-2)	Tahun 2016(thn n-1)	Tahun 2017 (thn n)	Tahun 2021 (thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Indeks kepuasan masyarakat			B	B	B	B	B	B	B	-	
2	Persentase ketersediaan barang cetakan dan penggandaan			80	83	85	90	80	83	85	-	
3	Persentase peningkatan pelayanan administrasi perkantoran			80	82	84	85	80	82	84	-	
4	Persentase ketersediaan belanja optimalisasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten)			0	0	0	75	0	0	0	-	
5	Persentase kelancaran penyediaan jasa pengiriman surat menyurat			70	73	75	80	70	73	75	-	
6	Persentase ketersediaannya jasa layanan komunikasi, air dan listrik			75	78	80	81	75	78	80	-	
7	Persentase peningkatan kualitas kebersihan kantor			80	84	86	90	80	84	86	-	
8	Persentase terlaksananya perpanjangan STNK sepeda motor			100	100	100	100	100	100	100	-	

9	Persentase meningkatnya pelayanan dan kinerja di kantor			85	85	90	95	85	85	90	-	
10	Persentase ketersediaan jasa pendukung administrasi / teknis perkantoran			90	90	95	95	90	90	95	-	
11	Persentase ketersediaannya makan dan minuman keperluan kantor			85	88	90	94	85	88	90	-	
12	Persentase terpeliharanya kendaraan dinas / operasional			90	90	95	95	90	90	95	-	
13	Persentase penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan formal			80	83	85	90	80	83	85	-	
14	Persentase meningkatkan pembangunan tahunan di wilayah Kecamatan Pengkadan			80	85	87	90	80	85	87	-	
15	Persentase meningkatnya kualitas penyelenggaraan administrasi keuangan.			80	82	85	88	80	82	85	-	
16	Meningkatnya persentase sinkronisasi tugas pokok dan fungsi			80	80	90	95	80	80	90	-	
17	Meningkatnya persentase sinkronisasi tugas pokok dan fungsi			80	80	90	95	80	80	90	-	
18	Persentase terlaksananya pelaporan Dana Desa dan Anggaran Dana Desa tepat waktu			90	95	95	100	90	95	95	-	
19	Persentase meningkatnya kualitas penyelenggaraan administrasi keuangan.			80	82	85	90	80	82	85	-	
20	Persentase peningkatan tertib administrasi keuangan			90	90	95	95	90	90	95	-	

21	Persentase Ketersediaan jasa peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan			90	90	95	95	90	90	95	-	
----	---	--	--	----	----	----	----	----	----	----	---	--



**Tabel T-C.30.**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Pengkadan**  
**Kabupaten Kapuas Hulu**

No	Indikator	SPM / standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2015 (thn n- 2)	Tahun 2016 (thn n- 1)	Tahun 2017 (thn n)	Tahun 2021(thn n+1)	Tahun 2015 (thn n- 2)	Tahun 2016(thn n-1)	Tahun 2017 (thn n)	Tahun 2021 (thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Persentase Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			-	-	-	-	-	-	-	90	
2	Persentase Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			-	-	-	-	-	-	-	90	
3	Persentase Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD			-	-	-	-	-	-	-	95	
4	Persentase Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			-	-	-	-	-	-	-	100	
5	Persentase Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			-	-	-	-	-	-	-	85	
6	Persentase Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			-	-	-	-	-	-	-	86	
7	Persentase Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			-	-	-	-	-	-	-	90	
8	Persentase Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			-	-	-	-	-	-	-	90	

9	Persentase Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			-	-	-	-	-	-	-	95	
10	Meningkatnya Persentase Penyediaan Jasa Surat Menyurat			-	-	-	-	-	-	-	95	
11	Persentase Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			-	-	-	-	-	-	-	94	
12	Meningkatnya Persentase Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			-	-	-	-	-	-	-	95	
13	Persentase Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			-	-	-	-	-	-	-	90	
14	Persentase Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif			-	-	-	-	-	-	-	95	

### 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Isu Strategis dan Permasalahan Pembangunan Kecamatan Pengkadan. Bagian ini akan membahas tentang hal-hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD. Hal-hal kritis yang dimaksudkan adalah permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD, dan bagaimana dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi dan target daerah serta tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD.

Kecamatan Pengkadan sesuai tugas dan fungsinya memegang fungsi koordinasi dan fasilitasi pelayanan umum dan pembangunan kemasyarakatan berdasar tugas dan fungsi, serta tugas koordinasi. Kecamatan Pengkadan masih memerlukan peningkatan pelayanan menghadapi tantangan depan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), terkait dengan beberapa keterbatasan, antara lain :

1. Prasarana dan sarana yang tersedia kurang lengkap dan belum memadai
2. Sistem kerja yang belum optimal
3. Sumber daya manusia yang belum optimal
4. Kapasitas kelembagaan desa belum optimal
5. Infrastruktur pedesaan masih kurang.

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Pengkadan, ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut :

1. Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah. Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.
2. Profesionalitas pelayanan kecamatan sebagai salah satu SKPD Kabupaten Pengkadan yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara optimal kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku.

3. Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur.
4. Mengoptimalkan pola koordinasi, fasilitasi melalui multi stakeholder yang ada di Kecamatan Pengkadan.

#### 2.4. Review Terhadap RKPD

Rencana Kerja Kecamatan Pengkadan berdasarkan RKPD Kabupaten Kapuas Hulu sifatnya sebagai pendukung dari pelaksanaan Renja SKPD se-Kabupaten Kapuas Hulu yang melaksanakan program dan kegiatan berlokasi di wilayah Kecamatan Pengkadan.

Rancangan awal prioritas pembangunan di Kecamatan Pengkadan Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2016 merupakan rumusan kebijakan pembangunan yang merupakan hasil kajian dari evaluasi hasil kinerja pembangunan pada tahun sebelumnya, hasil evaluasi capaian kinerja pembangunan dalam rentang waktu perencanaan, aspirasi masyarakat dalam Musrenbang Tahunan, perkiraan kemampuan daerah dan kebijakan pembangunan tahunan pemerintah.

Adalah letak geografis Kecamatan Pengkadan yang berdasarkan rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten Kapuas Hulu termasuk wilayah Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) sehingga pertumbuhan perekonomian maupun pembangunan mengarah ke Kecamatan Pengkadan baik dari sisi ekonomi, industri, dan jasa.

Konsep pembangunan yang berkelanjutan dan sinergis mengharuskan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan untuk disusun saling bersinergis. Berdasarkan konsep tersebut diharapkan bahwa pembangunan dapat bekerja dengan efektif, efisien dan sinergis sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Dalam review ini tersaji proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan, dan Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD (**Lihat Tabel T-C.31**)

**Tabel T-C.31.**  
**Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022**

**Kecamatan Pengkadan**

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Ke giatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/Ke giatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daeah Kabupaten/ Kota	Kantor Camat Pengkadan	Perencanaan,Penga nggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	100%	2,000,000	Program Penunjang Urusan Pemerintah n Daeah Kabupaten/ Kota	Kantor Camat Pengkadan	Perencanaan,Penga nggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	100%	2,000,000	
2			- Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	100%	2,000,000			- Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	100%	2,000,000	
3			- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	100%	2,000,000			- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	100%	2,000,000	
4			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	1,810,365,419			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	1,810,365,419	

5			- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100%	165,960,000			- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100%	165,960,000	
6			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	100%	18,000,000			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	100%	18,000,000	
7			Administrasi Umum Perangkat Daerah - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100%	3,640,000			Administrasi Umum Perangkat Daerah - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100%	3,640,000	
8			- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100%	2,800,000			- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100%	2,800,000	
9			- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	212,500,000			- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	212,500,000	

10			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100%	2,010,000			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100%	2,010,000	
11			- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	6,000,000			- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	6,000,000	
12			- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	153,600,000			- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	153,600,000	
13			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100%	400,000			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100%	400,000	

14	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Kantor Camat Pengkadan	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	100%	40.000.000	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Kantor Camat Pengkadan	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	100%	40.000.000	
15	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kantor Camat Pengkadan	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	100%	5,638,000	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kantor Camat Pengkadan	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	100%	5,638,000	



## 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kinerja pembangunan dapat diukur melalui berbagai parameter atau indikator kinerja, baik yang bersifat makro maupun mikro. Indikator kinerja makro merupakan dampak dari seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dan partisipasi sektor swasta (masyarakat), sedangkan indikator mikro merupakan parameter atau indikator kinerja untuk mengukur keberhasilan pemerintah melalui berbagai sasaran yang telah ditetapkan.

Capaian indikator makro berfungsi sebagai parameter keberhasilan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dalam meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk mendapatkan capaian indikator makro tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yaitu pemerintah harus fokus pada pendukung IPM yaitu terhadap indeks pendidikan, kesehatan dan daya beli masyarakat.
- b. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
- c. Jumlah Penduduk.
- d. Tingkat Kemiskinan.
- e. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).
- f. PDRB Per Kapita (Atas dasar harga konstan).
- g. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE).

Capaian kinerja pembangunan ditingkat kecamatan selama tahun 2016 s/d tahun 2021 yang tercermin pada tingkat capaian indikator makro merupakan kontribusi pencapaian program/kegiatan pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, baik yang menyangkut bidang ekonomi, bidang pendidikan, bidang kesehatan, maupun bidang sarana dan prasarana. Selain peran pemerintah kecamatan dan kabupaten, juga peran seluruh komponen masyarakat, swasta dan stakeholder pembangunan mempunyai andil yang besar dalam menyumbang tingkat pencapaian kinerja pembangunan, diantaranya melalui program swadaya masyarakat dengan kegiatan gotong royong.

Dalam hal ini yang terpenting pembangunan yang dilaksanakan oleh OPD Kecamatan harus berfokus kepada tugas pokok dan fungsi OPD itu sendiri, dengan memperhatikan inti pokok pembangunan yang dapat mempercepat laju pembangunan yaitu harus memperhatikan inti pokok yang akan dibangun antara lain:

- a. Pembangunan Bidang Pendidikan.

- b. Pembangunan Bidang Kesehatan.
- c. Pembangunan Bidang Ekonomi.
- d. Pembangunan Bidang Sarana Prasarana Wilayah

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2021 tampak dalam **Tabel T-C. 32.**

**Tabel T-C.32.**  
**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2021**  
**Kabupaten Kapuas Hulu**

**Kecamatan Pengkadan**

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kantor Camat Pengkadan	Penyediaan jasa surat menyurat	2,300,000	Kemungkinan Anggaran Tahun 2021 capaiannya tidak sesuai dengan perencanaan karena Dana yang dikelola Kecamatan sudah ditentukan oleh Pemda Kapuas Hulu
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	7,000,000	
			Penyediaan Jasa, Pengamanan dan Kebersihan kantor	5,815,000	
			Penyediaan Jasa perbaikan Peralatan Kerja	4,100,000	
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Gedung Kantor	4.000,000	
			Penyediaan Makanan dan Minuman	32,000,000	
			Penyediaan Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	25,470,000	
			Penyediaan Rapat-rapat Konsultasi dan kunjungan Kerja Dalam Daerah	95,000,000	
			Pembinaan Kemasyarakatan	80,300,000	
			Penyelenggaraan Musrembang Tingkat Kecamatan	4,150,000	
			Penyusunan RKA dan DPA	1,609,000	

			Penyediaan Jasa Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional	7,200,000	
			Penyediaan Pendidikan dan Pelatihan ( DIKLAT )	6,500,000	
2	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Kantor Camat PKD	Pembinaan dan pengawasan fisik ADD dan DD di Desa	10.000,000	

### BAB III TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN PENGKADAN

#### 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Identifikasi Kebijakan Nasional

Provinsi : Kalimantan Barat

Nama SKPD : Kecamatan Pengkadan

No.	Kebijakan Nasional	Sumber	Keterangan
1	2	3	4

Kecamatan Pengkadan Kabupaten Kapuas Hulu belum melaksanakan telaahan Kebijakan Nasional yang tertuang di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) maupun yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) maupun pengaruhnya terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang direncanakan.

#### 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Tujuan merupakan hasil akhir yang akan dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun, yang menggambarkan arah strategik organisasi. Dengan tujuan ini Kecamatan Pengkadan telah menetapkan sasaran dengan mempertimbangkan sumber daya manusia, kemampuan yang dimiliki, Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaiannya.

Sebagai penjabaran dari Misi, tujuan harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang.

Dengan demikian tujuan dapat bersifat kualitatif ataupun kuantitatif, harus searah dengan visi dan misi organisasi, merupakan jawaban atas prioritas permasalahan, mencakup jangka waktu relatif panjang, serta menunjukkan secara jelas arah program.

Agar dapat mengukur pencapaian tujuan pada suatu periode tertentu diperlukan adanya indikator kinerja tujuan, yang pada hakekatnya merupakan outcomes dari suatu atau kumpulan sasaran/program/kegiatan. Suatu instansi pemerintah dalam hal menetapkan tujuan haruslah

memperhatikan rumusan tujuan harus cukup jelas, rumusan tujuan harus diselaraskan dengan visi dan misi instansi, rumusan tujuan harus mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman instansi, rumusan tujuan harus mempertimbangkan faktor kunci keberhasilan, rumusan tujuan harus menggambarkan hasil yang ingin dicapai, rumusan tujuan harus mengakomodasi issue strategis yang dihadapi, rumusan tujuan harus mencerminkan “Core Area” dimana organisasi berperan.

Berdasarkan penjelasan di atas Kecamatan Pengkadan menetapkan tujuan dalam Tabel: 3.1

Tabel : 3.1

## Tujuan dan Sasaran OPD-SKPD Kecamatan Pengkadan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2022

No.	TUJUAN	SASARAN	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Target2021
1	Meningkatnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	%	90
		- Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	%	90
		- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Persentase Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	%	85
2	Meningkatnya akuntabilitas administrasi keuangan perangkat daerah.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	%	75
		- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	%	80
3	Meningkatnya administrasi kepegawaian perangkat daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	%	81
4	Meningkatnya administrasi umum perangkat daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	%	90
		- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	%	100
		- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	%	95

5	Meningkatnya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Meningkatnya Persentase Penyediaan Jasa Surat Menyurat	%	95
		- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	%	94
		- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Meningkatnya Persentase Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	%	95
6	Meningkatnya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	%	90
7	Meningkatkan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Persentase Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	%	90

Komitmen bersama Pemerintah dan masyarakat untuk menjaga kondisi kecamatan agar tetap dalam suasana kondusif dan toleran perlu di bangun bersama-sama secara terus menerus melalui semangat Persatuan dan Kesatuan serta menumbuhkembangkan kesadaran dalam menjaga lingkungan dalam setiap aktivitas perekonomian yang dilakukan masyarakat.

Sasaran Kecamatan Pengkadan merupakan penjabaran dari masing-masing tujuan yang ditetapkan dan dialokasikan secara periodik setiap tahun melalui serangkaian program di mana penetapannya diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi. Dalam kontek ini, organisasi memerlukan pondasi dalam meletakkan kerangka prioritas dengan memfokuskan arah semua program dan aktivitas organisasi pada pencapaian misi.

### 3.3. Program dan Kegiatan

Adapun Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023 Kecamatan Pengkadan Kabupaten Kapuas Hulu dalam pencapaiannya masih sulit dilaksanakan karena perencanaan selalu tidak sejalan dengan ketersediaan keuangan dalam APBD Kabupaten Kapuas Hulu. Ketidak sesuai ini biasanya disebabkan karena Pemerintah Daerah telah mematok angka anggaran untuk tiap-tiap Kecamatannya. Dengan perkataan lain, hampir tidak mungkin melaksanakan Rencana Kerja tahun 2023 bahkan seterusnya sesuai dengan perencanaan.

Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya akan terpaparkan dalam **Tabel T-C. 33.**



**Tabel : T-C.33**  
**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021**  
**Dan Prakiraan Maju Tahun 2020**  
**Kabupaten Kapuas Hulu**

**Kecamatan Pengkadan**

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7.01.01.2.01.03	Program Penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/ Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kantor Camat Pengkadan	100%	2,000,000	APBD	Kemungkinan Anggaran Tahun 2021 capaiannya tidak sesuai dengan perencanaan karena Dana yang dikelola Kecamatan sudah ditentukan oleh Pemda Kapuas Hulu	100%	2,000,000
7.01.01.2.01.04		- Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kantor Camat Pengkadan	100%	2,000,000	APBD		100%	2,000,000
7.01.01.2.01.05		- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kantor Camat Pengkadan	100%	2,000,000	APBD		100%	2,000,000
7.01.01.2.02.01		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kantor Camat Pengkadan	100%	1,810,365,419	APBD		100%	1,810,365,419

7.01.01.2.02.03		- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kantor Camat Pengkadan	100%	165,960,000	APBD		100%	165,960,000
7.01.01.2.05.02		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kantor Camat Pengkadan	100%	18,000,000	APBD		100%	18,000,000
7.01.01.2.06.01		Administrasi Umum Perangkat Daerah - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kantor Camat Pengkadan	100%	3,640,000	APBD		100%	3,640,000
7.01.01.2.06.05		- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kantor Camat Pengkadan	100%	2,800,000	APBD		100%	2,800,000
7.01.01.2.06.09		- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kantor Camat Pengkadan	100%	212,500,000	APBD		100%	212,500,000
7.01.01.2.08.01		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kantor Camat Pengkadan	100%	2,010,000	APBD		100%	2,010,000
7.01.01.2.08.02		- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kantor Camat Pengkadan	100%	6,000,000	APBD		100%	6,000,000

7.01.01.2.08.04		- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kantor Camat Pengkadan	100%	153,600,000	APBD		100%	153,600,000
7.01.01.2.09.01		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kantor Camat Pengkadan	100%	400,000	APBD		100%	400,000
7.01.06.2.01.13		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Kantor Camat Pengkadan	100%	5,638,000	APBD		100%	5,638,000

## BAB IV

### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN PENGKADAN

Rencana Kerja Kecamatan Pengkadan, Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023 disusun sebagai penjabaran dari RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu dan Renstra Kecamatan Pengkadan Tahun 2021-2026. Dalam dokumen ini memuat program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun, dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Sehubungan dengan hal tersebut diatas Kecamatan Pengkadan menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023, sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program kegiatan Tahun 2022. Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan pelayanan yang ada di Kantor Kecamatan Pengkadan dan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam menciptakan tatakelola pemerintahan yang baik sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya bisa dirasakan hingga ke level terbawah sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Output Renja Kecamatan Pengkadan adalah program tahunan Kecamatan Pengkadan yang sesuai dengan tupoksidan sasaran program Kecamatan Pengkadan. Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pengkadan ini disusun sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2021, dengan rencana kerja pelaksanaan anggaran diharapkan dapat memberikan gambaran pelaksanaan kegiatan pada Kecamatan Pengkadan, sehingga perencanaan dan penganggaran yang dibuat dapat berhasil dan berdaya guna bagi pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu. Tabel Berikut ini Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Pengkadan untuk tahun 2021. **(Lihat Tabel T-C.34)**

**Tabel T-C.34**  
**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN PENGKADAN**  
**KABUPATEN KAPUAS HULU**

**Kantor Kecamatan Pengkadan**

Kode	Program	Uraian	Jumlah Anggaran 2022	Target Program
1	2	3	4	5
5.1.1.01	<b>Belanja Gaji dan Tunjangan</b>			
5.1.1.01.01		Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	934,243,000	100%
5.1.1.01.02		Tunjangan Keluarga	89,665,000	100%
5.1.1.01.03		Tunjangan Jabatan	72,386,000	100%
5.1.1.01.05		Tunjangan Fungsional Umum	31,686,000	100%
5.1.1.01.06		Tunjangan Beras	58,463,000	100%
5.1.1.01.07		Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	1,011,000	100%
5.1.1.01.08		Pembulatan Gaji	11,000	100%
5.1.1.01.09		Iuran Jaminan Kesehatan	70,412,419	100%
5.1.1.01.10		Iuran Jaminan Kecelakaan	2,220,000	100%
5.1.1.01.11		Iuran Jaminan Kematian	6,659,000	100%
5.1.1.02	<b>Belanja Tambahan Penghasilan PNS</b>			
5.1.1.02.08		Tambahan Tunjangan Penghasilan PNSD berdasarkan pertimbangan objektif	543,609,000	100%
7.01.01 7.01.01.2.01 7.01.01.2.01.02	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1,050,000	100%
7.01.01.2.01.03		- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1,050,000	100%
7.01.01.2.02 7.01.01.2.02.01		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1,810,365,419	100%
7.01.01.2.02.03		- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	164,100,000	100%
7.01.01.2.05 7.01.01.2.05.02		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut	18,000,000	100%

		Kelengkapannya		
7.01.01.2.06 7.01.01.2.06.01		Administrasi Umum Perangkat Daerah - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3,642,000	100%
7.01.01.2.06 7.01.01.2.06.02		- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	66,790,000	100%
7.01.01.2.06.05		- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5,400,000	100%
7.01.01.2.06.09		- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	160,414,000	100%
7.01.01.2.07 7.01.01.2.07.01		Penyediaan Barang Miik DaerahPenunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	27,940,000	100%
7.01.01.2.07 7.01.01.2.07.11		- Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	14,915,000	100%
7.01.01.2.08 7.01.01.2.08.01		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2,400,000	100%
7.01.01.2.08.02		- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6,491,200	100%
7.01.01.2.08.03		- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	910,000	100%
7.01.01.2.08.04		- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	177,716,000	100%
7.01.01.2.09 7.01.01.2.09.01		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2,300,000	100%
7.01.01.2.09.06		- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	6,000,000	100%
7.01.03 7.01.03.2.03 7.01.06.2.01.02	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan - Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	40,000,000	100%

7.01.06 7.01.06.2.01 7.01.06.2.01.13	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	6,040,000	100%
--	--	--	-----------	------

## BAB V P E N U T U P

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pengkadan Tahun 2023 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Kecamatan Pengkadan 2016-2021 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Kabupaten Kapuas Hulu serta target dan sasaran pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2017. Rencana Kerja Kecamatan Pengkadan sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2022 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu.

Dengan adanya Rencana Kerja Kecamatan Pengkadan Tahun 2023, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Kecamatan Pengkadan diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu maupun dengan SKPD yang membidangi fungsi lain

Menendang,     Februari 2022  
Camat Pengkadan

**TABRI, S.E., M. AP**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19641222 198703 1 006